

## PENYEDIAAN FASILITAS PUBLIK YANG MANUSIAWI BAGI AKSESIBILITAS DIFABEL

Mujimin WM.<sup>4</sup>

### **Abstract**

*People with different abilities (Diffabel) have the same right and opportunity in all existence aspect. The opportunity can realize by provision at public facilities that humane for accessibility diffable.*

*To support it, the government was published the constitution, regulation, and include guideline technique of implementation of provision of public facilities for accessibility diffable. Carrying out of provision accessibility diffable public facilities organized by government and community at executed, comprehension, integrated, and continues. However, the realization of public facilities for accessibility diffable still very little, because of existence some obstructions, that is the less knowledge from owner or organizer of public facilities for the guideline accessibility diffable and comprehension for diffable does not enough.*

*Based on the situation, need the operation existence to motivate to increase the meaning and the knowledge for diffable and the knowledge for the guideline provision of public facilities for accessibility diffabel.*

### **Pendahuluan**

Setiap penyandang cacat (difabel) mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, seperti: pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya; perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya; aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya; rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosial dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Ringkasnya setiap difabel mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Kesamaan kesempatan bagi difabel dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas. Penyediaan aksesibilitas dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih

---

<sup>4</sup> Dosen Jurusan PLB FIP UNY



menunjang para difabel dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat. Penyediaan aksesibilitas diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat secara tegas termuat, “barang siapa yang tidak menyediakan aksesibilitas atau tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi difabel sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan dikenakan sanksi administrasi”.

Pada kenyataannya sampai saat ini pembangunan gedung-gedung di Indonesia baik gedung perkantoran, sekolah, kampus, bandara, terminal, hotel, dan lainnya sebagian besar cenderung belum mencerminkan keadilan bagi semua orang, dikarenakan belum dapat digunakan oleh kelompok masyarakat yang memiliki kecacatan atau keterbatasan fisik (difabel). Hal ini tidak sesuai dengan prinsip pembangunan dari PBB bahwa *“no part of the built-up environment should be designed in a manner that excludes certain groups of people on the basis of their ability and frailty”* (United Nations, 1995).

Dalam skala Internasional, perumusan kebijakan dan undang-undang tentang aksesibilitas telah dikumandangkan dalam UN-ESCAP dengan program dekade penyandang cacat (1983–1992 dan 1993–2002); Deklarasi Sapporo (2002) dan Biwako Milenium (2003), yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-hak kaum difabel dan lansia di dalam mendapatkan kesempatan yang setara untuk menikmati lajunya pembangunan guna meningkatkan kehidupan dan penghidupannya (Setyaningsih, 2005).

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam mewujudkan penyediaan fasilitas publik yang aksesibel adalah karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman pemilik atau pengelola fasilitas publik pada acuan aksesibilitas difabel dan juga kurangnya pemahaman pada kaum difabel, mengakibatkan kebutuhan kaum difabel terabaikan.

Berdasarkan kondisi tersebut kiranya diperlukan adanya upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap difabel serta pemahaman terhadap acuan penyediaan fasilitas publik bagi aksesibilitas difabel.



### Pengertian dan Permasalahan Difabel

Difabel merupakan istilah yang diindonesiakan dari *diffable* (*people with different abilities*). Masyarakat Barat memberikan nama kepada kaum difabel dengan istilah *disable* (tidak mampu), tetapi ada yang menyebut dengan istilah cacat (penyandang cacat). Istilah difabel memberikan perspektif berbeda dibandingkan dengan istilah penyandang cacat yang mempersepsikan sesuatu yang "gagal" produksi atau abnormal. Istilah difabel memberi peluang untuk memperhatikan masyarakat dengan kondisi berbeda sehingga istilah difabel juga mencakup orang tua lanjut usia (lansia), wanita hamil, dan kelompok lainnya yang memiliki kemampuan berbeda dengan kelompok masyarakat umumnya.

Istilah difabel menawarkan wacana lebih bijak, karena menempatkan orang yang memiliki hambatan sementara maupun permanen dalam menjalankan keseharian mereka dalam perspektif luas dan luwes, termasuk di dalamnya ibu hamil, anak-anak, lanjut usia, pengguna kursi roda, kruk, tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan sebagainya. Penggunaan istilah difabel juga mengajak kita memahami adanya keberagaman dan menghargai tingkat kemampuan antara satu orang dan lainnya. Stevie Wonder, penyanyi terkenal tunanetra menjadi salah satu bukti tingkat kemampuan berbeda kaum "difabel" dalam konotasi positif. Contoh lain, Gus Dur pernah diakui sebagai orang nomor satu di Indonesia karena visinya yang luas, walaupun beliau harus "didampingi" ketika berjalan (Ikaputra, 2002).

Penyandang kelainan (difabel) sebagai warga masyarakat, dengan label yang masyarakat berikan, mereka banyak menghadapi permasalahan yang sangat kompleks, baik yang menyangkut perolehan hak maupun dalam hal pemenuhan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Manifestasi permasalahan tersebut tergantung dari jenis kelainannya. Mereka yang mengalami kelainan penglihatan akan mengalami kesulitan orientasi dan mobilitas. Untuk mengenal lingkungan dan berkomunikasi, mereka memerlukan sarana khusus, seperti tongkat, buku-buku Braille, kaca mata bantu, dan sebagainya. Mereka yang mengalami gangguan organ bicara, memerlukan latihan khusus, seperti artikulasi, bina persepsi bunyi dan sebagainya. Begitu juga mereka yang mengalami cacat tubuh, akan terganggu saat



berjalan atau perpindahan tempat, termasuk dalam hal *activity of daily living*, dan mereka memerlukan pula alat bantu berjalan, alat penguat tubuh, dan sebagainya.

Kecuali masalah yang disebabkan oleh kelainannya, para difabel juga mengalami masalah yang disebabkan oleh sikap masyarakat. Selama ini belum semua anggota masyarakat bersikap positif terhadap kaum difabel. Kehadiran difabel belum diterima sepenuhnya, bahkan tidak sedikit orang tua yang masih merasa malu dengan anaknya yang difabel.

Sikap negatif masyarakat ini membawa dampak kesulitan fisik dan psikologis bagi kaum difabel. Secara psikologis, kaum difabel harus menanggung beban rasa rendah diri. Secara fisik, mereka menerima perlakuan yang kurang wajar, misalnya hambatan dalam belajar, penyesuaian dalam kehidupan masyarakat, mencari pekerjaan, aksesibilitas, dan sebagainya.

Masalah yang dihadapi para difabel yang sering mencuat adalah belum tersedianya fasilitas publik yang memungkinkan mereka hidup mandiri, misalnya belum semua sekolah terbuka bagi difabel, belum semua sekolah mempunyai sarana bagi pemakai kursi roda, belum semua sarana umum seperti stasiun kereta api, gedung bioskop, pertokoan/pasar, dan sebagainya mempunyai toilet atau fasilitas lain yang aksesibel bagi kaum difabel.

### **Fasilitas Publik dan Aksesibilitas Difabel**

Fasilitas publik adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk kaum difabel dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan (Anonim, 2006).

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas dalam bangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas. Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian: (1) Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan



yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. (3) Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. (4) Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain (Anonim,2006).

Adapun fasilitas publik aksesibilitas difabel pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi: (a) Ukuran dasar ruang; (b) Jalur pedestrian; (c) Jalur pemandu; (d) Area parkir; (e) Pintu; (f) Ram; (g) Tangga; (h) Lif; (i) Lif tangga /*stairway lift*; (j) *Toilet*; (k) Pancuran; (l) *Wastafel*; (m) Telepon; (n) Perlengkapan dan Peralatan Kontrol; (o) Perabot; dan (p) Rambu dan Marka (Anonim,2006).

Berbagai fasilitas publik yang aksesibel tersebut sudah ada pentunjuk teknisnya yang terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Dalam naskah ini hanya dikemukakan beberapa contoh, antara lain, berkenaan dengan ukuran dasar ruang, jalur pemandu, ram, dan *toilet*, sebagai berikut:

### 1. Ukuran Ruang

#### a. Esensi

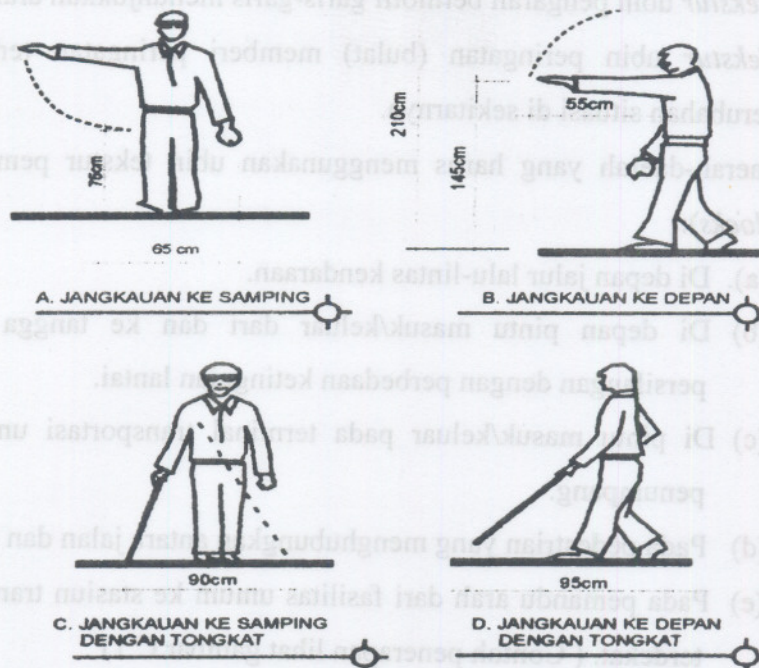
Ukuran dasar ruang tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi) yang mengacu kepada ukuran tubuh manusia dewasa, peralatan yang digunakan, dan ruang yang dibutuhkan untuk mewadahi pergerakannya.

#### b. Persyaratan

- 1) Ukuran dasar ruang diterapkan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan, bangunan dengan fungsi yang memungkinkan digunakan oleh orang banyak secara sekaligus, seperti balai pertemuan, *bioskop*, dan sebagainya. harus menggunakan ukuran dasar maksimum.
- 2) Ukuran dasar minimum dan maksimum yang digunakan dalam pedoman ini dapat ditambah atau dikurangi sepanjang asas-asas aksesibilitas dapat tercapai.

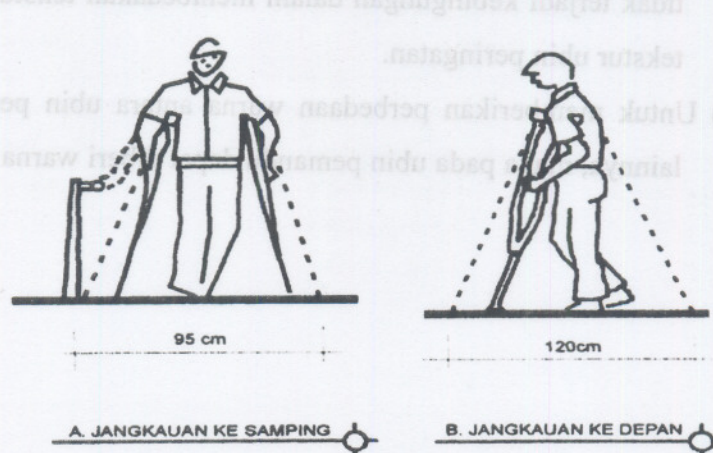


## c. Ukuran Dan Detail Penerapan Standar



Gambar A-2

## RUANG GERAK BAGI TUNA NETRA



Gambar A-1.

## RUANG GERAK BAGI PEMAKAI "KRUK"

## 2. Jalur Pemandu

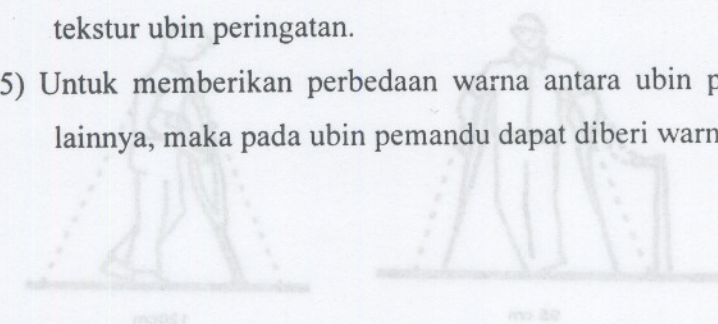
## a. Esensi

Jalur yang memandu kaum difabel untuk berjalan dengan memanfaatkan *tekstur* ubin pengarah dan ubin peringatan.

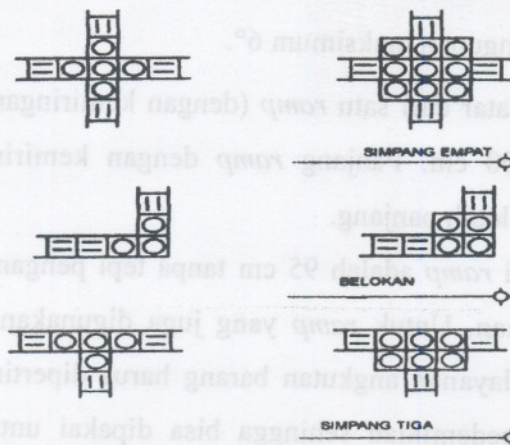


b. Persyaratan

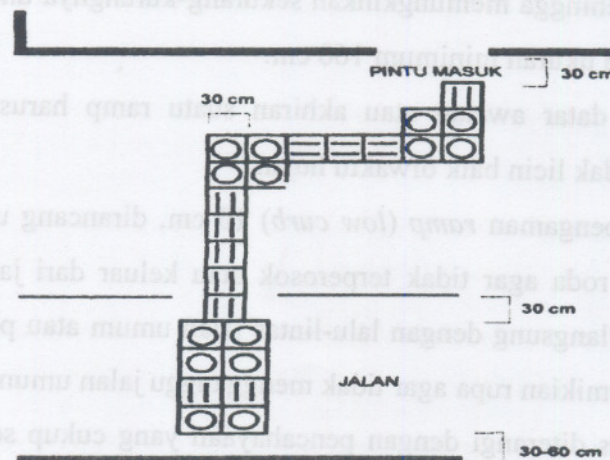
- 1). *Tekstur* ubin pengarah bermotif garis-garis menunjukkan arah perjalanan.
- 2) *Tekstur* ubin peringatan (bulat) memberi peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya.
- 3) Daerah-daerah yang harus menggunakan ubin *tekstur pemandu (guiding blocks)*:
  - (a). Di depan jalur lalu-lintas kendaraan.
  - (b) Di depan pintu masuk/keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai.
  - (c) Di pintu masuk/keluar pada terminal transportasi umum atau area penumpang.
  - (d) Pada pedestrian yang menghubungkan antara jalan dan bangunan.
  - (e) Pada pemandu arah dari fasilitas umum ke stasiun transportasi umum terdekat. ( Contoh penerapan lihat gambar C.1)
- 4) Pemasangan ubin *tekstur* untuk jalur pemandu pada pedestrian yang telah ada perlu memperhatikan *tekstur* dari ubin *eksisting*, sedemikian sehingga tidak terjadi kebingungan dalam membedakan *tekstur* ubin pengarah dan *tekstur* ubin peringatan.
- 5) Untuk memberikan perbedaan warna antara ubin pemandu dengan ubin lainnya, maka pada ubin pemandu dapat diberi warna kuning atau jingga.







Gambar C-3.  
SUSUNAN UBIN PEMANDU  
PADA BELOKAN



Gambar C-4.  
SUSUNAN UBIN PEMANDU  
PADA PINTU MASUK

### 3. Ramp

#### a. Esensi

Ramp adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.

#### b. Persyaratan-persyaratan

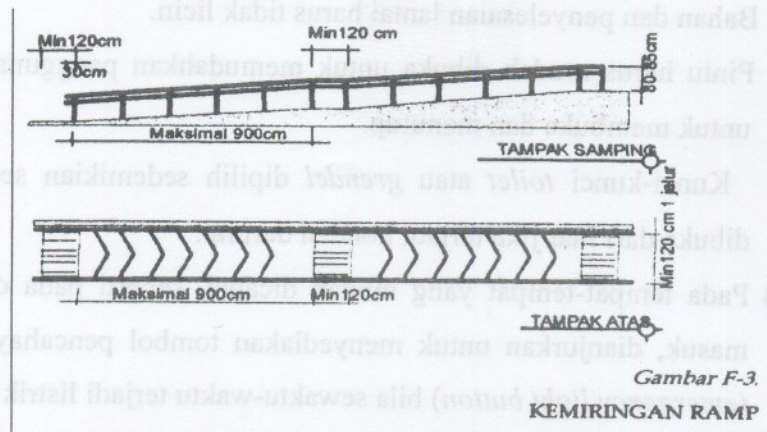
- 1) Kemiringan suatu ramp di dalam bangunan tidak boleh melebihi  $7^\circ$ , perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan atau akhiran



*ramp* (*curb ramps/landing*) Sedangkan kemiringan suatu *ramp* yang ada di luar bangunan maksimum  $6^\circ$ .

- 2). Panjang mendatar dari satu *ramp* (dengan kemiringan  $7^\circ$ ) tidak boleh lebih dari 900 cm. Panjang *ramp* dengan kemiringan yang lebih rendah dapat lebih panjang.
- c. Lebar minimum dari *ramp* adalah 95 cm tanpa tepi pengaman, dan 120 cm dengan tepi pengaman. Untuk *ramp* yang juga digunakan sekaligus untuk pejalan kaki dan pelayanan angkutan barang harus dipertimbangkan secara seksama lebarnya, sedemikian sehingga bisa dipakai untuk kedua fungsi tersebut, atau dilakukan pemisahan *ramp* dengan fungsi sendiri-sendiri.
- d. Muka datar (*bordes*) pada awalan atau akhiran dari suatu *ramp* harus bebas dan datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk memutar kursi roda dengan ukuran minimum 160 cm.
- e. Permukaan datar awalan atau akhiran suatu *ramp* harus memiliki *tekstur* sehingga tidak licin baik diwaktu hujan.
- f. Lebar tepi pengaman *ramp* (*low curb*) 10 cm, dirancang untuk menghalangi roda kursi roda agar tidak terperosok atau keluar dari jalur *ramp*. Apabila berbatasan langsung dengan lalu-lintas jalan umum atau persimpangan harus dibuat sedemikian rupa agar tidak mengganggu jalan umum.
- g. *Ramp* harus diterangi dengan pencahayaan yang cukup sehingga membantu penggunaan *ramp* saat malam hari. Pencahayaan disediakan pada bagian-bagian *ramp* yang memiliki ketinggian terhadap muka tanah sekitarnya dan bagian-bagian yang membahayakan.
- h. *Ramp* harus dilengkapi dengan pegangan *rambatan* (*handrail*) yang dijamin kekuatannya dengan ketinggian yang sesuai





#### 4. Kamar Kecil

##### a. Esensi

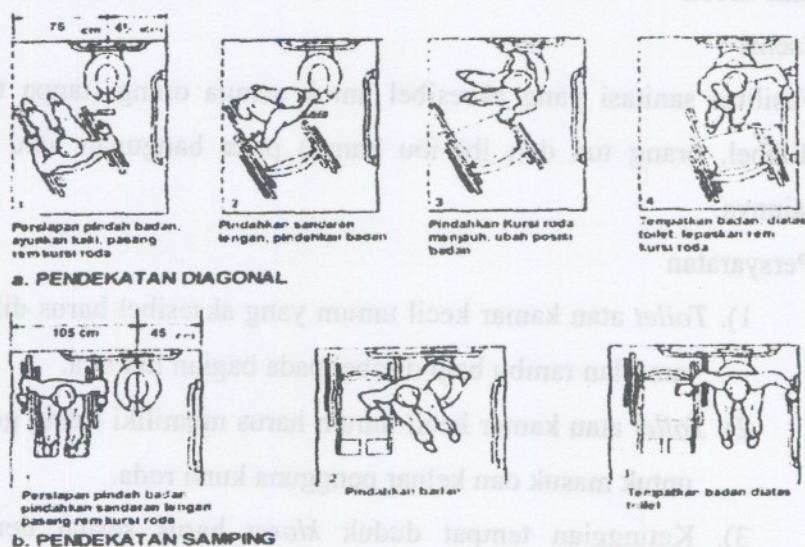
Fasilitas sanitasi yang aksesibel untuk semua orang (tanpa terkecuali kaum difabel, orang tua dan ibu-ibu hamil) pada bangunan atau fasilitas umum lainnya.

##### b. Persyaratan

- 1). *Toilet* atau kamar kecil umum yang aksesibel harus dilengkapi dengan tampilan rambu bagi difabel pada bagian luarnya.
- 2). *Toilet* atau kamar kecil umum harus memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar pengguna kursi roda.
- 3). Ketinggian tempat duduk *kloset* harus sesuai dengan ketinggian pengguna kursi roda. (45-50 cm)
- 4). *Toilet* atau kamar kecil umum harus dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*) yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda dan kaum difabel yang lain. Pegangan disarankan memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda.
- 5). Letak kertas tisu, air, kran air atau pancuran (*shower*) dan perlengkapan-perengkapan seperti tempat sabun dan pengering tangan harus dipasang sedemikian hingga mudah digunakan oleh orang yang memiliki keterbatasan-keterbatasan fisik dan bisa dijangkau pengguna kursi roda.
- 6). Kran pengungkit sebaiknya dipasang pada *wastafel*.



- 7) Bahan dan penyelesaian lantai harus tidak licin.
- 8) Pintu harus mudah dibuka untuk memudahkan pengguna kursi roda untuk membuka dan menutup.
- 9) Kunci-kunci toilet atau *grendel* dipilih sedemikian sehingga bisa dibuka dari luar jika terjadi kondisi darurat.
- 10) Pada tempat-tempat yang mudah dicapai, seperti pada daerah pintu masuk, dianjurkan untuk menyediakan tombol pencahayaan darurat (*emergency light button*) bila sewaktu-waktu terjadi listrik padam



Gambar 1-3.

#### ANALISA RUANG GERAK RUANG TOILET DENGAN PENDEKATAN DIAGONAL DAN PENDEKATAN SAMPING

Fasilitas layanan publik berupa gedung dan lingkungannya terebut sudah selayaknya berlaku universal bagi semua orang, termasuk bagi kaum difabel, ini bukan dalam pengertian mengistimewakan kaum difabel, melainkan suatu pendekatan yang menganjurkan agar suatu desain direncanakan dan dirancang memenuhi kebutuhan spesifik kaum difabel, tetapi sekaligus juga memenuhi kebutuhan pengguna lain.



Prinsip layanan fasilitas publik aksesibilitas difabel sebenarnya sangat sederhana, kata aksesibel merujuk pada arti yaitu bahwa semua orang termasuk kaum difabel, tanpa bantuan siapa pun, dapat mencapai dan memasuki suatu lingkungan-kawasan bangunan kemudian dapat menggunakan seluruh fasilitas di dalamnya tanpa merasa menjadi obyek belas kasihan orang lain <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0205/19/iptek/ruan15.htm> 18/04/07.

Setiap orang butuh solidaritas, sebuah masyarakat tanpa solidaritas merupakan sebuah tempat yang dingin dan tidak nyaman untuk semua warganya. Perasaan keamanan, perasaan tanggung jawab untuk orang lain dan pengetahuan bahwa orang lain merasa bertanggung jawab atas sesamanya akan memberi kualitas hidup sebagai manusia dan kemanusiaan (Husveg, 1998).

Tidak ada orang yang dapat menjamin bahwa yang bersangkutan akan tetap dapat mempertahankan kondisi “tidak difabel” untuk seumur hidupnya dan setiap orang dapat mempunyai saudara atau teman yang menjadi difabel. Difabel dapat menimpa siapa pun tanpa melihat jenis kelamin, umur, status sosial ataupun status ekonomi. Oleh karena itu, untuk mencapai sebuah masyarakat di mana kaum difabel menikmati kesamaan kesempatan dan partisipasi penuh seyogyanya layanan fasilitas publik tidak hanya demi kepentingan kaum difabel tetapi juga demi kepentingan masyarakat pada umumnya, sehingga menyediakan fasilitas aksesibilitas difabel adalah sama halnya membangun aspek kemanusiaan..

### **Realisasi Fasilitas Aksesibilitas Difabel**

Belum diperoleh data pasti tentang realisasi fasilitas publik bagi aksesibilitas difabel di Indonesia, tetapi bukan berarti tidak ada informasi tentang hal itu. Selama ini banyak dinamika yang berkait dengan aksi dan reaksi berkenaan dengan aksesibilitas difabel.

Tidak sedikit peraturan atau perundang-undangan yang mengatur tentang keberadaan para difabel, antara lain: (1) Resolusi PBB No. 48/96 Th.1993 pada peraturan No. 5, tentang Peraturan Aksesibilitas; (2) UUD RI Th. 1945 Pasal 27 ayat 2, bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa; (4) UUD RI No. 4/1997, tentang Penyandang CACAT, (5)



Undang-undang RI No. 39/1999, tentang HAM, Kesamaan hak dalam kehidupan; (6) Undang-undang RI No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung; (7) Perpem. No. 43/1998, Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat; (8) Kepmen. PU. No. 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; (9) Kepmen. PU. No 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan; (10) Kepmen . Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1999, tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan; dan (11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Perundangan dan peraturan tersebut hingga saat ini belum juga direalisasikan secara memadai. Alasan yang sering digunakan adalah tidak tersedianya anggaran yang tersedia untuk membangun fasilitas publik yang aksesibel bagi difabel.

Kaum difabel tidak henti-hentinya berjuang untuk terealisasinya fasilitas publik yang aksesibel. Di Yogyakarta, para difabel pernah melakukan aksi menuntut diperlakukan adil dan penghapusan perlakuan diskriminatif oleh pemerintah. Mereka berdialog dengan Ketua DPRD DIY H. Djuwanto, mereka menyampaikan keluhan bahwa mereka masih merasakan adanya perlakuan diskriminatif oleh pemerintah, salah satu perlakuan yang diskriminatif tersebut adalah minimnya fasilitas publik bagi kaum difabel. (<http://www.detikhot.com/index.php> 18/04/07).

Tuntutan serupa juga dilakukan kaum difabel di berbagai kota seperti: di Solo, Semarang, Surabaya, Bandung, Jakarta, Medan dan kota-kota lainnya. Intinya mereka berharap pemerintah dapat memberikan fasilitas umum yang tidak diskriminatif.

Dari berbagai tuntutan tersebut telah membuahkan hasil, contoh: Balai Kota Surakarta dan Pasar Gede sudah dilengkapi kemudahan untuk tunanetra dan pengguna kursi roda. Fasilitas difabel di Balai Kota termasuk cukup lengkap seperti tangga datar (*ramp*) dan *hand rel* untuk pengguna kursi roda serta *guiding block* atau batu bata bertekstur yang digunakan untuk penunjuk jalan tuna netra. (Suara Merdeka, Sabtu, 20 September 2003).



Di Yogyakarta, di sepanjang *trotoar* Jl. Malioboro penggal Hotel Garuda sampai Jl. Perwakilan, di antara sesaknya perabot kota, vegetasi, dan gerobak warung kaki lima, ada menyembul satu garis lurus ubin pemandu. Ubin ini dibangun sejak 20 September 1999, menjelang diadakannya *Diseminasi Nasional Perwujudan Fasilitas Umum yang Aksesibel bagi Semua*. Selain pada Jalan Malioboro sudah ada beberapa hotel yang memberikan ruangnya untuk para difabel yaitu Hotel Melia - penerima Penghargaan Aksesibilitas '99 - dan Hotel Hyatt Regency menyediakan beberapa kamar khusus dan fasilitas lain seperti *toilet* dan *ramp* untuk para difabel (<http://arsitekstur.tripod.com/html/liputan1.htm> 19/04/07).

Apabila kita cermati memang realisasi penyediaan fasilitas yang aksesibel masih sangat minim. Banyak sekolah, kampus, kantor-kantor, restoran, terminal bus, stasiun, pusat pertokoan, *trotoar*, dan fasilitas umum lainnya yang belum menyediakan fasilitas yang aksesibel bagi para difabel. Bahkan banyak sekolah luar biasa yang notabene berkecimpung dengan kaum difabel belum juga dilengkapi fasilitas yang aksesibel, termasuk kampus UNY yang notabene juga ada Jurusan Pendidikan Luar Biasa.

Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam mewujudkan fasilitas yang aksesibel (*universal design sebagai architectural barrier free*) bagi kelompok masyarakat difabel, antara lain yakni, kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari pemilik(pengelola) bangunan gedung mengenai acuan aksesibilitas serta pemahaman terhadap kaum difabel. Akibat dari terbatasnya pengetahuan tersebut, pemilik(pengelola) bangunan gedung belum tergerak untuk memberikan perhatian kepada kaum difabel, sehingga kebutuhan kaum difabel terabaikan. Selain itu juga belum terjadinya *partnership* antara mereka yang terkait dengan penyediaan fasilitas publik bagi aksesibilitas difabel.

Untuk dapat merealisasikan terwujudnya bangunan gedung yang aksesibel, maka diharapkan dari pihak terkait, pemerintah, swasta, pengelola/pemilik, penyedia jasa dan masyarakat pada umumnya, dapat merealisasikannya secara terpadu, sinergis dan koordinatif agar dapat mewujudkan bangunan gedung yang manusiawi, bermartabat dan dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali (Setyaningsih, 2005).



### Penutup

Difabel adalah bukan *disabel* yang tidak memiliki kemampuan, mereka memiliki kekurangan dan kelebihan sebagaimana manusia yang lain. Mereka perlu aksesibilitas agar supaya dapat menjalankan tugas dan kewajiban dalam kehidupannya. Namun demikian disadari bahwa fasilitas publik masih belum aksesibel bagi difabel meskipun sudah banyak produk hukum yang mengaturnya. Hal ini disebabkan karena masih banyak pejabat penentu kebijakan dalam tataran praktis yang belum memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap adanya aturan tentang aksesibilitas difabel, demikian pula terhadap pemahaman dan kesadaran kepada para difabel, sehingga berakibat pada pelayanan fasilitas publik yang aksesibel pada difabel terabaikan.

Berkenaan dengan itu maka sosialisasi mengenai aksesibilitas difabel kepada semua komponen baik unsur penyelenggara pemerintah terutama yang berkait dengan pengadaan fasilitas publik dan kepada khalayak umum lainnya perlu ditingkatkan. Selain itu bagi lembaga-lembaga pemerintah khususnya yang selalu berkecimpung dengan akses difabel perlu membuat contoh model fasilitas publik yang aksesibel bagi para difabel dan dibangunnya *petnership* antara berbagai pihak yang terkait.

### Daftar Pustaka

Anonim, 2001. *A City For All, Barrier-Free Environment Finland; National Center on Accessibility (NCA); Integrated National Disability Strategy of the Government of National Uni (CUDD. Dept. of Arhitecture, Gadjah Mada University, Indonesia.*

-----, 2006. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan*

ESCAP, 1995. *Promotion of Non-Handicapping Physical Environments for Disabled Persons. Casestudies, ESCAP, United Nations, New York.*

Husveg J. Arne, 1998. *Norwegian Association of the Blind and Partially Sighted (NABP).*



Ikaputra, 2002. *The Role of Guiding Blocks to Promote Barrier-Free Environment in Indonesia*. Paper presented at International Conference for Universal Design, Yokohama, Japan.

Lynch, K, 1987. *Good City Form*. The MIT Press.

Rapoport, A, 1987, *The Meaning of The built Environment, An Nonverbal Communication Approach*. Sage Publication.

Setyaningsih W, 2005. *Policy and regulation supporting inclusion in Indonesia, Perwujudan Elemen Aksesibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan*. UNS, Unit Kajian Aksesibilitas Arsitektur.

Suara Merdeka, Sabtu, 20 September 2003.

[www.arsitekstur.tripod.com/html/liputan1.htm](http://www.arsitekstur.tripod.com/html/liputan1.htm) - 19/04/07).

[www.detikhot.com/index.php/mobile.read/tahun/2005](http://www.detikhot.com/index.php/mobile.read/tahun/2005) - 18/04/07

[www.kompas.com/kompas-cetak/0205/19/iptek/ruan15.htm](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0205/19/iptek/ruan15.htm) - 18/04/07